

SKRIPSI

PENERTIBAN BANGUNAN TANPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

AUKHFA AMALIA

2210113042

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing:

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Amelia Zulfitri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No.Reg: 20/PK-VII/IV/2026

	No. Alumni Universitas		Aukhfah Amalia	No. Alumni Fakultas	
	a.	Tempat/Tgl Lahir	Bangkinang/ 20 April 2004	f.	Tanggal Lulus : 19 Agustus 2026
	b.	Nama Orangtua	Azri dan Yuli	g.	Predikat Lulus : Dengan Pujian
	.		Heriyanti	h.	Lama Studi : 4 Tahun
	c.	Fakultas	Hukum	i.	IPK : 3,80
	d.	PK	Administrasi Negara	j.	Alamat : Bukit Sembilan, Kabupaten Kampar
	e.	No. BP	2210113042		

PENERTIBAN BANGUNAN TANPA PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA, KABUPATEN KAMPAR

Aukhfah Amalia, 2210113042, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Izin Mendirikan Bangunan berganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung merupakan bentuk perizinan yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik bangunan sebelum melakukan pembangunan, baik itu membangun baru, merubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan. Setiap bangunan yang dibangun baru dan perubahan pada bangunan yang merubah struktur bangunan maka wajib melaporkan untuk pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung lagi. Akan tetapi, dalam kenyataannya di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar masih ada bangunan yang didirikan tanpa memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, bagaimana penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, serta bagaimana tindak lanjut hasil penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan ialah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penertiban bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung di Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dilaksanakan melalui beberapa tahapan yakni pengawasan dan pemeriksaan dilapangan, pemberian surat peringatan, penghentian sementara kegiatan pembangunan, hingga penerapan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam tindak lanjut hasil penertiban memberikan kesempatan kepada pemilik bangunan untuk memenuhi kewajiban administrasi yang ditetapkan serta diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan koordinasi antarinstansi dan optimalisasi pengawasan agar pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci : Penertiban Bangunan, Persetujuan Bangunan Gedung, Penegakan Hukum Administrasi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Agustus 2026.

Penguji,

Tanda Tangan		1. 	2. 
Aukhfah Amalia		Hendria Fithrina, S.H., M.H	Darnis, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara: **Hendria Fithrina, S.H., M.H**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas dan mendapat nomor almus:

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama: Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas		Aukhfa Amalia	No. Alumni Fakultas	
	a.	Place/Date of Birth	Bangkinang/ April 20, 2004	f.	Graduation Date : August , 2026
	b.	Parent's Name	Azri and Yuli Heriyanti	g.	Pass Predicate : Cumlaude
	c.	Faculty	Law	h.	Length of Study : 4 years
	d.	Concentration	Administrative Law	i.	GPA : 3,82
	e.	Student ID.	2210113042	j.	Address : Bukit Sembilan, Kampar Regency

ENFORCEMENT OG BUILDINGS WITHOUT BUILDING APPROVAL PERMITS IN BANGKINANG KOTA SUBDISTRICT, KAMPAR REGENCY

Aukhfa Amalia, 2210113042, Faculty of Law, Andalas University, 72 Pages, 2026

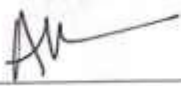
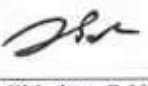
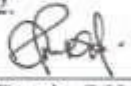
ABSTRACT

Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation transformed the Building Construction Permit (*Izin Mendirikan Bangunan* or IMB) into the Building Approval Permit (*Persetujuan Bangunan Gedung* or PBG). A Building Approval Permit is a mandatory authorization that must be obtained by every building owner before constructing a new building, modifying, expanding, reducing, or maintaining a building in accordance with the applicable technical standards. Any newly constructed building or any alteration that affects the structure of an existing building requires the owner to apply for a new Building Approval Permit. However, in practice, there are still buildings in Bangkinang Kota District, Kampar Regency, that have been erected without complying with these requirements. This research focuses on the implementation of Building Approval Permits in Bangkinang Kota District, Kampar Regency, the enforcement measures taken against buildings constructed without Building Approval Permits, and the follow-up actions resulting from such enforcement. This study employs an empirical juridical research method. Data were collected through interviews and document studies, while the data were analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that the enforcement of regulations against buildings without Building Approval Permits in Bangkinang Kota District, Kampar Regency, is carried out through several stages, including field supervision and inspection, the issuance of warning letters, the temporary suspension of construction activities, and the imposition of administrative sanctions in accordance with Government Regulation Number 16 of 2021 concerning the Implementing Regulation of Law Number 28 of 2002 on Buildings. As part of the follow-up measures, building owners are given the opportunity to fulfill the required administrative obligations. In addition, greater public outreach, stronger coordination among relevant institutions, and the optimization of supervisory mechanisms are necessary to ensure that the implementation of Building Approval Permits can be carried out effectively.

Keywords: *Building Enforcement, Building Approval Permit, Administrative Law Enforcement.*

This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on August 19, 2026.

Examiner,

Signature	1.	2.
		
Aukhfa Amalia	Hendria Fithrina, S.H.,M.H	Darnis, S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Administrative Law: **Hendria Fithrina S.H., M.H**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: